

Belajar dari Pemilu Amerika Serikat 2008 untuk Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia

A. Safril Mubah

*Pengajar Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Airlangga*

Abstract

This article aims to find lessons that Indonesia can get from the United States (US) Elections of 2008. As a developed country which has long tradition in democracy, the US shows high quality democracy practice in every election. It is proven by all stage of US Elections of 2008 which has many precious lessons for developing countries that is looking for the best democracy model and election system, like Indonesia. By viewing presidential candidates' long road to the White House, and analyze it using Samuel Huntington's, Robert Dahl's, Afan Gaffar's, and Alexis de Tocqueville's opinion about democracy and elections, it could be found four lessons for Indonesia. First, the leader should be selected through bottom-up process. Second, everyone has equal opportunity to serve political position. Third, people need to be involved in contributing and organizing campaign fund. Fourth, every candidate should be ready to win and lose.

Keywords: elections, democracy, the United States, Indonesia.

Amerika Serikat (AS) dan Indonesia termasuk dalam kategori negara demokrasi terbesar di dunia. Di antara semua negara demokrasi di dunia, AS adalah negara demokrasi terbesar kedua dengan jumlah populasi sekitar 304 juta jiwa dan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga dengan jumlah penduduk sekitar 238 juta (<http://www.internetworldstats.com/stats8.htm>, diakses 24 November 2008). Karena itu, dalam setiap kali pemilihan umum, kedua negara ini sering menjadi pusat perhatian dunia. Keberhasilan pemilu dan kualitas demokrasi di kedua negara ini bisa menjadi model penerapan praktek demokrasi di negara-negara dengan jumlah populasi lebih kecil. Sebuah sistem yang mampu mengatur ratusan juta penduduk dengan tingkat kompleksitas tinggi yang

dijalankan di AS dan Indonesia dapat dijadikan pelajaran bagi negara-negara lain yang juga menerapkan demokrasi.

Sebagai negara demokrasi, AS dan Indonesia menerapkan sistem pemilihan umum sebagai cara perekrutan kepemimpinan nasional dan lokal, baik di bidang eksekutif maupun legislatif. Pemilu juga dijalankan sebagai pintu masuk bagi rotasi kekuasaan secara berkala. Di dalamnya, hak-hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih dijunjung tinggi. Dalam hal ini, pemilu tidak terbatas pada pemilihan presiden saja, tapi juga pemilihan gubernur, pemilihan bupati/waikota, pemilihan senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hingga kini, AS telah mengadakan 56 kali pemilihan presiden sejak diadakan pertama kali pada 1789 (<http://www.historycentral.com/elections/1789.html>, diakses 24 November 2008). Lain halnya dengan pemilihan presiden langsung dengan sistem *electoral college* yang dimulai pada 1789, pemilihan senator secara langsung baru terlaksana pertama kali pada 1913 setelah amandemen ke-17 Konstitusi AS (http://www.senate.gov/artandhistory/history/minute/State_Houses_Elect_Senators.htm, diakses 24 November 2008).

Sementara, sejak merdeka pada 1945, Indonesia telah mengadakan sembilan kali pemilu legislatif. Pemilu ini diadakan pertama kali pada 1955, dan berlanjut pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Sedangkan, pemilihan presiden (pilpres) langsung baru diadakan satu kali pada 2004. Sebelumnya, presiden dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilu legislatif dan eksekutif berikutnya diadakan pada 2009. Sementara, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung baru diadakan pertama kali pada 2005. Seperti halnya pemilihan presiden, sebelum 2005, gubernur dan bupati/walikota dipilih oleh DPRD setempat.

Disimak dari sejarah pemilu di AS dan Indonesia, tampak ada babakan dalam melaksanakan sebuah sistem pemilihan eksekutif secara langsung oleh rakyat. AS membutuhkan waktu 13 tahun sejak merdeka dalam melaksanakan pemilihan presiden langsung. Dibandingkan Indonesia yang membutuhkan 59 tahun untuk bisa mewujudkan pilpres langsung, dapat dikatakan AS lebih lebih maju dalam memberikan penghargaan tertinggi pada rakyat untuk menentukan presidennya sendiri.

Dalam konteks sekarang, tampak ada perbedaan besar di antara kedua negara dalam mempraktekkan demokrasi yang terwujud dalam pemilu beserta semua tahapannya. Dengan pengalaman panjangnya selama 232 tahun menerapkan demokrasi, AS memperlihatkan kualitas yang lebih baik dibandingkan Indonesia

yang baru 63 tahun berdemokrasi. Buktinya tampak dari perbandingan pelaksanaan pemilu dan pergantian presiden di antara kedua negara.

Pemilu di AS dilaksanakan secara berkala tiap empat tahun sekali untuk presiden, tiap enam tahun sekali untuk senator, dan tiap dua tahun sekali untuk anggota House of Representatives (HoR). Waktu pelaksanaan pemilihan presiden selalu pada hari Selasa setelah Senin pertama dalam bulan November ketika tahun pemilihan. Penentuan waktu itu diputuskan pada 1845. Kemudian pada 1875, hari Selasa juga sekaligus diputuskan sebagai hari pemilihan anggota HoR. Pada 1914, hari Selasa juga ditetapkan sebagai pemilu Senat (*Kompas*, 31 Oktober 2008).

Untuk menyepakati jadwal itu, AS membutuhkan waktu 69 tahun sejak kemerdekaannya pada 1776. Di Indonesia, waktu pelaksanaan pemilu pasca reformasi 1998 kerap kali berubah. Pemilu 1999 dilaksanakan pada 7 Juni. Pemilu 2004 diadakan pada Senin, 5 April. Pemilu 2009 sedianya diselenggarakan juga pada 5 April, di hari Minggu. Namun, karena ada keberatan dari pihak tertentu yang berpotensi menurunkan angka partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubahnya pada Rabu, 9 April. Sementara, jadwal pemilihan presiden hingga kini belum diputuskan. KPU hanya bisa menentukan bahwa pemilihan presiden dilaksanakan pada bulan Juli. Ketidakpastian jadwal ini menandakan Indonesia belum memiliki sistem aturan yang kokoh dalam penentuan tanggal pemilu sehingga memungkinkan adanya protes dari pihak yang merasa dirugikan.

Di samping itu, disimak dari perjalanan kandidat mulai sejak awal pencalonan hingga hasil pemilu diumumkan, AS juga memperlihatkan kematangan demokrasi yang layak dipelajari. Proses seleksi kandidat presiden AS dijalankan melalui kompetisi ketat dan jalan berliku. Setiap orang yang ingin jadi presiden harus memulai jalan sejak dari bawah, melalui kompetisi perebutan tiket nominasi partai lewat konvensi hingga bertarung *head to head* melawan kandidat dari partai lain. Dalam perjalanan panjangnya menuju Gedung Putih, setiap kandidat beserta timnya mengelola dana kampanye secara mandiri dan mengandalkan sumbangan dari individu. Ketika hasil pemilihan telah diketahui dan pemenang telah diputuskan, mereka menampilkan kedewasaan berpolitik dengan menerima hasil itu dengan lapang dada.

Contoh terakhir bisa dipelajari dari pelaksanaan Pemilu AS pada Selasa, 4 November 2008. Pemilu yang diselenggarakan secara serentak untuk memilih presiden, 11 gubernur, 35 senator, 435 anggota HoR itu tercatat sebagai pemilu paling bersejarah yang mengandung sejumlah pelajaran berharga bagi Indonesia yang sedang bongkar pasang mencari model terbaik demokrasi dan sistem pemilu.

Sesuai dengan model praktek demokrasi AS dalam pelaksanaan tahapan pemilu, setiap orang yang menginginkan posisi presiden harus mendapatkan tiket

nomominasi dari partainya. Tiket itu tidak didapatkan secara gratis, melainkan harus melewati persaingan dengan nominator lain untuk memperebutkan suara delegasi di setiap negara bagian dalam *primary* (pemilihan pendahuluan) maupun kaukus. Kandidat presiden dalam pemilu itu, Barack Obama dan John McCain, beserta kandidat lain yang sempat mencalonkan diri (Hillary Clinton, John Edwards, Joe Biden, Chris Dodd, Mike Gravel, Dennis Kucinich, Bill Richardson, Mick Huckabee, Mitt Romney, Ron Paul, Fred Thompson, Duncan Hunter, Rudolph Giuliani) melalui jalan itu. Tak peduli dari suku mana dan daerah mana mereka berasal, warna kulit apa yang mereka miliki, ras apa yang mengalir dalam diri mereka, agama apa yang mereka anut; mereka memiliki kesempatan yang sama dan setara untuk bertarung memperebutkan jabatan politik. Dalam konteks itu, dana yang mereka keluarkan pun juga secara mandiri.

Semua praktek demokrasi yang ditampilkan dalam Pemilu AS melahirkan sebuah sistem jujur dan adil serta situasi stabil dan kondusif yang mencitrakan tingginya kualitas demokrasi. Pemilu AS 2008 berjalan secara teratur dan damai. Semua perdebatan dan pertentangan berhenti setelah hasil final diketahui. Mayoritas rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tampak puas dengan proses pemilu dari awal hingga akhir.

Di Indonesia, kondisi semacam itu sulit terjadi. Di antara masyarakat, seringkali ada pihak-pihak yang tidak puas dan lantas melayangkan gugatan. Tak jarang hal itu menimbulkan konflik di akar rumput. Karena itu, sebagai negara yang masih dalam tahap konsolidasi demokrasi, Indonesia perlu belajar dari praktek demokrasi AS yang diperlihatkan dalam Pemilu 2008. Pembelajaran ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Pembelajaran ini juga mendesak dilaksanakan mengingat Indonesia akan menghadapi Pemilu 2009. Pembelajaran ini diharapkan bisa dijadikan contoh bagi partai politik dan para politisi Indonesia untuk menerapkan sebuah sistem yang berkualitas dan memperlihatkan praktek demokrasi yang berkualitas pula.

Pemilu dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

Untuk menghasilkan pembelajaran yang tepat, perlu kiranya menyimak pendapat Samuel P. Huntington, Robert Dahl, Afan Gaffar, dan Alexis de Tocqueville tentang demokrasi. Huntington mengemukakan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat. Ia menilai bahwa sistem politik yang demokratis adalah sejauh mana para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, dan berkala, bahwa para calon bebas bersaing untuk memperoleh dukungan suara pemilih (Huntington 1997, 4-5). Demokrasi AS memungkinkan

adanya sebuah model seleksi kepemimpinan secara kompetitif oleh rakyat. Para kandidat bebas bersaing meraih dukungan pemilih melalui *primary*, kaukus, dan pemilihan presiden. Mereka dipilih secara berkala dalam sebuah pemilu yang jujur dan adil. Menurut Huntington, inilah sistem politik paling demokratis.

Sementara, Dahl menguraikan adanya tujuh indikator kualitas demokrasi suatu negara. Pertama, kontrol atas keputusan dan kebijakan pemerintah secara konstitusional dikuasakan kepada pejabat terpilih. Kedua, pemegang jabatan publik dipilih dan diganti secara damai melalui pemilu yang jujur dan adil secara berkala tanpa adanya paksaan kepada rakyat. Ketiga, semua warga negara dewasa memiliki hak untuk memilih dalam pemilu. Keempat, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat memiliki hak untuk berkompetisi memperebutkan jabatan publik dalam pemilu. Kelima, setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan kebebasannya, terutama ekspresi politik dalam mengkritisi penguasa dan mengomentari kebijakan pemerintah. Keenam, setiap individu mempunyai akses terhadap sumber-sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tertentu. Ketujuh, mereka memiliki hak untuk membentuk dan bergabung dalam partai politik atau kelompok kepentingan (Dahl 1989, 233).

Tidak jauh berbeda dengan Dahl, Afan (2006, 7-9) merumuskan lima indikator tatanan politik yang demokratis. Pertama, setiap pemegang jabatan politik harus memiliki akuntabilitas publik yang tinggi. Kedua, dalam demokrasi, peluang terjadinya rotasi kekuasaan harus ada serta dilakukan secara teratur dan damai. Ketiga, rekrutmen politik perlu dilaksanakan secara terbuka untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan karena setiap orang memiliki hak dan kesempatan sama untuk berkompetisi memperebutkan jabatan politik. Keempat, pemilu dilaksanakan secara teratur dengan memberikan kebebasan kepada semua warga negara untuk menentukan pilihannya. Kelima, setiap warga negara bebas menikmati hak-hak dasar, seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers bebas.

Terkait dengan hak untuk berkumpul seperti yang dikemukakan Dahl dan Afan, Tocqueville menilainya sebagai hak paling alamiah manusia. Hak ini hampir sama tak terpisahkannya dengan hak atas kebebasan pribadi. Bagi Tocqueville yang telah melakukan perjalanan keliling AS untuk mengamati kehidupan demokrasi negara ini, tidak ada negara di dunia yang lebih berhasil dalam menerapkan prinsip perkumpulan atau lebih unggul menerapkan prinsip ini untuk berbagai tujuan daripada AS (Tocqueville dalam Stone dan Mennel 2005, 86).

AS memang menunjukkan praktek demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berkumpul dalam wadah organisasi, komunitas, kelompok kepentingan, dan partai politik secara bebas. Praktek ini juga didukung oleh prinsip

menyetarakan semua manusia dalam posisi sederajat, tak ada yang lebih unggul dari yang lain, sesuai dengan kata-kata John Locke (1632-1704) yang tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan AS (1776) bahwa "...that men are created equal".

Berdasarkan pendapat Dahl, Afan dan Tocqueville, sistem politik demokratis setidaknya harus menjamin rakyat agar bebas menentukan pilihannya terhadap semua kandidat yang akan menduduki jabatan publik dalam sebuah pemilihan berkala yang memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai. Dalam sistem itu, semua individu ditempatkan pada posisi setara. Mereka memiliki hak dan kesempatan sama dalam semua aktivitas politik. Sistem semacam ini memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyeleksi calon pemimpin mereka sejak awal proses pencalonan. Di AS, seleksi itu dilakukan setiap empat tahun sekali dan selalu berjalan secara teratur dan damai. Dalam sejarah AS, tidak pernah terjadi hasil pemilu digugat hingga memunculkan konflik yang merugikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Mengacu landasan pemikiran yang digunakan dalam tulisan ini, ditemukanlah empat pelajaran yang bisa dijadikan contoh bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas demokrasi negeri ini menjelang pelaksanaan Pemilu 2009. Pertama, seleksi calon pemimpin nasional harus dilaksanakan melalui proses *bottom up* untuk menghasilkan pemimpin yang mengakar di masyarakat. Kedua, seluruh lapisan masyarakat harus diperlakukan setara dengan memberikan kesempatan sama untuk menduduki jabatan politik. Ketiga, untuk menjamin akuntabilitas publik dan transparansi anggaran, masyarakat perlu dilibatkan dalam penggalian dana kampanye dan penggunaan dana itu harus dilaporkan secara transparan. Keempat, setiap kandidat presiden, gubernur, bupati/walikota, dan anggota legislatif harus menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi dengan memperlihatkan sikap untuk siap menang dan siap kalah. Dalam tulisan ini, keempat pelajaran tersebut dipaparkan secara berurutan.

Seleksi Calon Pemimpin

Seleksi calon presiden AS dilaksanakan melalui proses *bottom up* yang menempatkan anggota partai di level paling bawah sebagai penentu utama. Obama dan McCain terpilih sebagai capres di partainya masing-masing tidak melalui penunjukan para elite partai, melainkan dipilih oleh mayoritas anggota partai dalam *primary* dan kaukus di seluruh negara bagian.

Proses seleksi presiden AS diawali ketika seorang politisi yang ingin menjadi presiden mendeklarasikan dirinya. Deklarasi itu penting dilakukan untuk mengumumkan pencalonannya dan menarik dukungan dari berbagai pihak. Setelah deklarasi, politisi itu mendaftarkan diri untuk mengikuti konvensi di

partainya masing-masing. Dalam konvensi, terjadi kompetisi untuk memperebutkan nominasi dari partai melalui *primary* dan kaukus di semua negara bagian. Penentu lolos tidaknya sebagai kandidat presiden yang dicalonkan partai ditentukan oleh para anggota partai yang memilih dalam *primary* dan kaukus. Setelah terpilih sebagai kandidat presiden, baru kemudian berkompetisi dengan kandidat partai lain untuk memperebutkan jabatan presiden (Janda et al. 1992, 305-307).

Sebagai presiden terpilih, Obama melalui semua rangkaian proses itu. Obama mendeklarasikan diri sebagai capres jauh hari sebelum pemilu, tepatnya pada 10 Februari 2007. Sedangkan, John McCain mendeklarasikan diri pada 25 April 2007. Mereka lantas berkompetisi dengan kandidat lain di partainya masing-masing melalui *primary* dan kaukus yang dimulai 3 Januari 2008 di Iowa dan berakhir pada 3 Juni 2008 di South Dakota. Dalam proses itu, masyarakat di akar rumput benar-benar berperan sebagai penentu tiket nominasi capres. Kedaulatan mereka benar-benar dijunjung tinggi. Mereka lah yang menentukan terpilihnya Obama dan gugurnya pencalonan Hillary dalam konvensi Partai Demokrat pada 25-28 Agustus 2008 di Denver. Mereka juga yang menentukan terpilihnya McCain dalam Konvensi Partai Republik pada 1-4 September 2008 di Minnesota.

Dalam mekanisme semacam itu, semua elemen partai dari semua tingkatan memiliki hak sama. Hak pejabat partai dalam memilih capres tak ada bedanya dengan hak anggota biasa. Tak peduli tua atau muda, tak peduli senior atau junior, tak peduli pimpinan atau bawahan, posisi mereka setara. Tak ada oligarki kelompok tertentu. Karena itu, capres yang terpilih adalah capres yang benar-benar mengakar dan memahami kebutuhan masyarakat bawah.

Dengan proses itu, masyarakat secara kasat mata dapat melihat integritas dan catatan baik dari perjalanan sosok para calon. *Track record* yang buruk bisa dipastikan bakal tak banyak menarik simpati, dukungan, apalagi sumbangan dana. Tetapi, *track record* yang bersih dapat dipastikan akan menarik dukungan masyarakat.

Model seleksi kepemimpinan seperti ini memungkinkan para pemilih untuk berperan aktif dalam mendukung dana, memberikan masukan, bahkan ikut membantu calon favoritnya menyelesaikan persoalan yang ada. Pemilih atau para pendukung harus ikut bertanggung jawab agar calonnya lolos. Semuanya harus berlangsung terbuka dan dengan besar hati serta lapang dada. Namun, partisipasi aktif itu ini akan kian hidup apabila muncul sosok calon yang berintegritas, punya catatan perjalanan yang bersih dalam semua aspek. Sosok demikian biasanya sudah muncul lama dan catatan perjalanannya dikenal orang sehingga dijagokan. Demokrasi AS memungkinkan semua itu terjadi.

Ini sangat berbeda dengan proses seleksi capres di Indonesia. Seluruh capres yang telah muncul untuk bertarung pada Pemilu 2009 adalah sosok yang sangat elitis. Mereka menjadi capres bukan karena dinominasikan oleh sebagian besar pemilih di partainya, melainkan ditunjuk oleh pejabat partai. Sehingga, dapat dikatakan mereka muncul bukan dari proses seleksi. Karena itu, wajar apabila popularitas dan tingkat kepercayaan publik kepadanya rendah.

Kondisi ini terjadi karena tradisi kepartaian di Indonesia tidak mengenal konvensi sebagai proses seleksi capres. Partai-partai di Indonesia juga tidak pernah menyelenggarakan pemilihan internal yang melibatkan seluruh anggota di seluruh wilayah Indonesia untuk memutuskan kandidat yang diusung sebagai presiden. Pada 2004, Partai Golkar pernah melaksanakan terobosan dengan mengadakan konvensi yang diikuti oleh sejumlah politisi, baik dari internal maupun eksternal partai. Partai ini melibatkan pengurus-pengurus di tingkat daerah –tidak seluruh anggota partai- untuk menentukan capres terpilih.

Langkah itu sebenarnya merupakan langkah awal yang bagus untuk menghasilkan capres hasil seleksi ketat yang mengakar di masyarakat. Sayangnya, awal yang bagus itu tidak diteruskan menjadi sebuah kompetisi internal dengan kualitas lebih baik pada 2009, tetapi malah ditiadakan. Pada Pemilu 2009, Partai Golkar justru lebih memilih capresnya berdasarkan hasil survei.

Kondisi yang kurang lebih sama juga terjadi pada partai lain. Partai Demokrat sudah dipastikan mencalonkan kembali Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai capres. Kedudukan SBY sebagai *incumbent* menjadikan dia melenggang dalam penominasian capres Partai Demokrat dengan mudah, tanpa seleksi, dan tanpa saingan. Untuk menghadapi SBY, PDI Perjuangan telah memutuskan Megawati sebagai capres tanpa melalui proses seleksi. Meskipun selalu dikatakan bahwa pencalonan Megawati berdasarkan aspirasi dari bawah, tetapi sejauh ini belum terbukti secara riil seberapa besar dukungan massa PDI-P pada Megawati. Keputusan ini juga mematikan kesempatan kader lain PDI-P yang berminat menjadi capres.

Jika Partai Demokrat dan PDI-P telah resmi memiliki capres, partai-partai lain masih mencari capres dengan caranya masing-masing. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengundang sejumlah politisi yang telah mendeklarasikan diri sebagai capres untuk menyampaikan visi dan misinya dalam forum PPP Mendengar (*Kompas*, 10 Desember 2008). Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengumumkan sembilan kader terbaiknya yang berpotensi menjadi capres, namun belum bergerak untuk menyeleksinya (*Jawa Pos*, 29 Desember 2008). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga telah menentukan delapan kadernya yang dinilai layak sebagai capres, tetapi belum memiliki kejelasan mekanisme penyinggannya (*Kompas*, 28 Oktober 2008).

Realita bahwa tidak ada satu pun partai di Indonesia yang menyeleksi capresnya melalui kompetisi internal yang melibatkan semua anggota partai menjadi pertanda oligarkisnya kehidupan kepartaian di negeri ini. Suara elite partai ternyata lebih tinggi dan lebih berpengaruh dibandingkan suara anggota partai. Anggota partai biasa tidak bisa menentukan sendiri capres yang diinginkannya. Maka, tidak mengherankan apabila muncul ketidakpuasan di kalangan anggota partai atas munculnya capres yang tidak dikehendaki masyarakat bawah.

Belajar dari partai-partai di AS, sudah saatnya partai-partai di Indonesia menjalankan pemilihan pendahuluan secara internal untuk memutuskan capres yang dijagokan. Pemilihan semacam ini semestinya tidak hanya berlaku ketika memilih ketua umum partai, tetapi juga calon-calon yang ditampilkan partai dalam pemilu legislatif maupun pemilihan presiden. Inilah mekanisme paling demokratis yang dapat menghasilkan capres yang dikehendaki mayoritas rakyat

Kesetaraan dan Kesamaan Kesempatan

AS membuktikan bahwa tanahnya adalah tempat berpijak semua golongan, baik mayoritas maupun minoritas. AS juga telah meraih salah satu impiannya (*American dream*) untuk menempatkan semua orang, apapun latar belakangnya, dalam posisi setara, seperti yang tercantum dalam deklarasi kemerdekaannya. Selama ini, AS selalu menganggap dirinya sebagai pangeran demokrasi. Tapi pada kenyataannya, pilar demokrasi yang menempatkan semua warga dalam posisi setara tak terwujud di situ. Bertahun-tahun AS dikotak-kotakkan oleh segregrasi ras. Warga kulit hitam dianggap sebagai warga kelas dua. Mereka tak memiliki kesempatan sama seperti halnya orang kulit putih.

Namun, terpilihnya Obama yang berasal dari golongan minoritas telah meleburkan segmentasi itu. Kemenangan Obama merupakan hasil perjuangan panjang warga kulit hitam sejak diskriminasi ras dihapuskan pada 1960-an. Waktu itu, ketika perjuangan politik antidiskriminasi melawan paham rasial membuahkan hasil dengan dikeluarkannya sejumlah undang-undang hak sipil, tidak ada yang berani memperkirakan seorang warga kulit hitam keturunan Afro-Amerika bisa menjadi presiden.

Jesse Jackson, seorang tokoh kulit hitam AS, pernah mencoba meraih impian itu ketika dia mencalonkan diri menjadi presiden dalam Pemilu 1988. Tetapi, sebelum mencapai tahapan akhir, dia dikalahkan oleh Michael Dukakis dalam Konvensi Partai Demokrat. Karena itu, setelah Obama memenangkan tiket nominasi Partai Demokrat dan kemudian mengalahkan McCain sehingga

dipastikan terpilih sebagai presiden, sejarah baru bagi kesetaraan dan kesamaan kesempatan semua warga negara AS telah tercipta.

Kemenangan Obama memberikan pelajaran bahwa siapapun berhak mencalonkan diri dan bertarung memperebutkan jabatan politik dan terpilih menduduki jabatan itu. Dalam demokrasi, hak-hak kaum minoritas harus dihargai sejajar dengan mayoritas. Demokrasi tak mengenal kulit putih atau kulit hitam, lelaki atau wanita, Islam atau Kristen, Jawa atau luar Jawa, tua atau muda, yang ada hanyalah warga negara dengan hak-hak politik sama di depan hukum.

Meski demikian, sebagai negara demokrasi, Indonesia belum sepenuhnya menjalankan praktek semacam itu. Demokrasi Indonesia masih sering terganggu oleh diskriminasi terhadap kalangan tertentu. Setiap kali pemilu, selalu muncul isu dikotomis Jawa-luar Jawa, lelaki-perempuan, sipil- militer, dan sebagainya. Seolah ada pihak yang lebih berkuasa dibandingkan pihak lain yang minoritas. Seakan-akan kaum minoritas dan terpinggirkan secara politik tidak memiliki kemampuan menduduki jabatan publik, tidak layak menjadi pemimpin, tidak berhak berpartisipasi dalam kompetisi politik memperebutkan kekuasaan.

Dalam Pemilu 2004 misalnya, ada upaya mendiskreditkan capres perempuan. Sejumlah kiai waktu itu memfatwakan bahwa perempuan tidak layak menjadi kepemimpinan bangsa. Karena itu, hukum memilih capres perempuan adalah haram. Tak dapat dibantah, fatwa itu ditujukan untuk menghambat tampilnya Megawati sebagai presiden.

Di Indonesia, praktek diskriminasi dengan memberikan keistimewaan pada pihak tertentu dan mematikan kesempatan pihak lain sangat marak terjadi dalam proses penentuan caleg Pemilu 2004. Di sejumlah partai, sangat banyak anggota keluarga pimpinan partai yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan mereka ditempatkan di nomor urut satu pada daerah pemilihan yang memungkinkan mereka terpilih dengan mudah. Padahal, mereka adalah orang baru dalam dunia politik. Hal ini tentu mematikan kesempatan anggota partai yang telah lama berpolitik sejak dari bawah dan menunggu kesempatan untuk menapak karir hingga puncak. Apabila jalur di atas dipotong oleh anggota keluarga pimpinan partai tentu ini bukan proses politik yang adil.

Sebagai contoh, putra kedua Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono ditempatkan sebagai caleg nomor urut satu pada Daerah Pemilihan Jatim VII. Padahal Edhi minim pengalaman politik dan begitu masuk dunia politik langsung bertengger di puncak. Meskipun SBY telah mencoretnya sebagai nomor urut satu dan menurunkannya di nomor empat, tetapi bau nepotisme politik tetap tercium. Sejumlah anggota keluarga Megawati seperti Puan Maharani (anak) dan Guruh Soekarnoputra (adik) juga menjadi caleg nomor satu PDI-P. Dave Laksono, putra

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, ditempatkan di nomor urut teratas partai berlambang pohon beringin itu. Sementara, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali juga memasang istrinya, Wardatul Asriah, pada nomor jadi daftar caleg PPP.

Setiap orang memang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik. Namun, persoalan menjadi lain jika mereka mendapatkan kesempatan itu karena kedekatannya dengan pimpinan partai, bukan karena kemenangan dalam kompetisi politik. Jika ini yang terjadi, berarti ia mendapatkan keistimewaan yang tidak bisa didapat kader lain yang telah malang-melintang dalam dunia politik dan merintis karir dari bawah. Kondisi ini jelas merupakan ancaman bagi demokrasi. Pemberian kesempatan istimewa bagi pihak-pihak tertentu telah menutup peluang para kader atau aktivis partai yang benar-benar berjuang meniti karir politik dari bawah.

Di AS, sejumlah anggota keluarga politisi ternama juga terlibat dalam dunia politik. Hanya saja, keterlibatan mereka hingga di pentas nasional bukan karena faktor kedekatan dengan kerabatnya yang jadi pejabat partai. Keberhasilannya di pentas politik disebabkan oleh kemampuan dan prestasinya yang memang lebih unggul dibandingkan yang lain.

Misalnya, keluarga Kennedy sangat dikenal sebagai keluarga terpandang dalam politik AS. Anggota klan politik ini yang mencapai karir politik tertinggi adalah John F. Kennedy (JFK), presiden AS tahun 1961-1963. Adiknya, Ted Kennedy, merupakan senator yang telah menjabat sejak 1962 dan kini tercatat sebagai senator paling senior kedua di Kongres. Ted terpilih pertama kali menjadi senator ketika JFK masih berkuasa. Tetapi, keberhasilannya terpilih sebagai senator bukan karena dia saudara kandung JFK, melainkan memang dia merintis karir dari bawah dan melalui serangkaian tahapan hingga mampu menjadi senator. Dalam serangkaian tahapan itu, ia menyisihkan kandidat lain hingga terpilih menjadi senator berkali-kali tanpa campur tangan JFK.

Begitu pula dengan keluarga Bush. Terpilihnya George W. Bush sebagai capres Partai Republik pada 2000 dan juga sebagai presiden selama dua kali pemilu (2000 dan 2004) juga bukan karena pengaruh ayahnya, George H. W. Bush, yang menjabat presiden pada 1989-1993. George W. Bush menjadi capres Partai Republik bukan karena keterlibatan ayahnya yang merupakan pejabat dan sesepuh partai, tetapi karena dia memenangkan kompetisi internal partai dengan mengalahkan sejumlah kandidat lain dalam konvensi.

Belajar dari itu, untuk menjamin kesetaraan dan kesempatan yang sama; sistem demokrasi Indonesia harus menerapkan keterbukaan yang menjamin adanya

kesempatan yang sama dalam kompetisi politik yang jujur dan adil. Jabatan publik adalah hak semua orang. Karena itu, tidak ada kelompok mana pun yang merasa lebih berhak dan tidak boleh memiliki hak dalam percaturan mengisi jabatan-jabatan publik itu.

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, semua elemen di Indonesia harus memberikan kesempatan yang sama pada setiap individu. Dalam kerangka itu, tidak boleh ada yang mengistimewakan kerabatnya dibandingkan yang lain, tidak boleh ada yang menggunggulkan lelaki dengan mendiskreditkan perempuan, tidak boleh ada yang mengklaim orang Jawa pasti lebih mampu menjadi presiden dibanding orang luar Jawa, serta tidak boleh ada yang lebih mengutamakan militer dan meminggirkan masyarakat sipil. Melalui sikap seperti itulah, pilar-pilar demokrasi Indonesia dapat berdiri dengan tegak dan kokoh.

Dana Kampanye

Pemilu AS tahun 2008 tercatat sebagai pesta demokrasi paling bergelimang uang dalam sejarah. Total dana kampanye pemilu ini telah memecahkan rekor pemilu-pemilu sebelumnya. Federal Election Commission (FEC) mengumumkan, total dana kampanye Obama dan McCain mencapai 1,2 miliar USD. Jumlah ini hampir dua kali lipat total dana kampanye pemilu 2004 yang mencapai 693 juta USD (*Kompas*, 1 November 2008).

Model pengumpulan dana kampanye di AS dilakukan secara terbuka dan diatur oleh FEC. Sejak 1976, capres diperbolehkan menerima dana dari publik. Publik menyumbangkan dananya langsung kepada tim kampanye capres, bukan kepada pengurus atau komite nasional partai yang bersangkutan. FEC membatasi sumbangan dana kampanye dari individu maksimal sebesar 1.000 USD dan dari organisasi sebanyak-banyaknya 5.000 USD. Dampak dari pembatasan ini adalah setiap capres akan memiliki dana seimbang. Namun, pada kenyataannya selalu ada kandidat yang memiliki dana jauh lebih banyak dibandingkan kandidat lain. Ini disebabkan lebih banyaknya pendukung yang menyumbangkan dananya bagi kandidat itu (Janda et al. 1992, 313).

Obama misalnya, memperoleh dana kampanye total sekitar 742 juta USD. Dana ini lebih banyak dibandingkan McCain yang mendapatkan 367 juta USD. Tingginya perolehan dana kampanye Obama dikarenakan banyaknya penyumbang pribadi yang mendukungnya. Di antara total semua dana kampanye Obama, sekitar 657 juta USD (89 persen) berasal dari sumbangan individu. Sedangkan, McCain mendapatkan sumbangan sekitar 200 juta USD (54 persen) dari individu

(<http://www.opensecrets.org/preso8/index.php?cycle=2008>, diakses 30 November 2008).

Dengan total penerimaan itu, Obama menjadi kandidat pertama yang membiayai hampir seluruh kampanyenya dari sumbangan-sumbangan pribadi. Tim kampanye Obama memanfaatkan internet untuk menjaring pendukung dan mengumpulkan dana. Melalui situs jejaring sosial seperti Facebook, Friendster, My Space, dan You Tube, Obama mendapatkan dana dari jutaan pendukungnya yang menyumbang secara *online*. Dengan cara seperti itu, Obama mampu meraup dana 3,1 juta USD atau sekitar 86 USD per orang, hanya dari internet (*Kompas*, 1 November 2008).

Salah satu sisi menarik dari pengumpulan total dana kampanye kedua capres itu adalah keterlibatan masyarakat luas dalam penggalangan dana kampanye. Mereka dengan sukarela menyisihkan sebagian uangnya. Hebatnya, ketika menyumbang, mereka tak menuntut konsesi apapun. Kalaupun ada, mereka hanya menginginkan capres yang mereka dukung mampu mewujudkan sebuah kehidupan yang lebih baik.

Dukungan dari para pribadi yang dilakukan Obama lewat internet merupakan sebuah pelajaran berharga. Ada sebuah pesan agar para pendukung seorang calon harus terlibat aktif. Namun, untuk bisa menggerakkan masyarakat agar terlibat aktif, tentu ada persyaratannya. Syarat itu adalah calon presiden harus benar-benar dapat dipercaya dan menjanjikan adanya perubahan kehidupan yang lebih baik (*Kompas*, 2 November 2008).

Di sini, ada transaksi politik sederhana. Harus ada konsistensi antara agenda mendorong perubahan dengan tingkat dukungan publik. Harus ada pula hubungan antara agenda memperjuangkan peningkatan lapangan kerja dengan dukungan publik yang nyata dalam bentuk sumbangan untuk pemenangan atas agenda tersebut (*Jawa Pos*, 21 November 2008).

Di Indonesia, para capres belum terbiasa melakukan itu. Kebanyakan sumbangan yang mengalir ke kantong capres berasal dari orang-orang tertentu yang sangat kepentingan. Akibatnya, setelah terpilih, capres dipaksa untuk memberikan konsesi yang menguntungkan penyandang dana. Di sinilah benih-benih korupsi rawan terjadi.

Contoh kasusnya, pada Pemilu 2004, ada indikasi para capres waktu itu memperoleh dana bantuan kampanye ilegal dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menyatakan bahwa capres PAN, Amien Rais, menerima dana nonbujeter DKP

sebesar Rp 400 juta. Amien lantas memberikan pengakuan bahwa ada capres yang dana kampanyenya berasal dari DKP. Amien juga mengindikasikan adanya capres yang menerima sokongan dana dari pihak asing. Pengakuan Amien ini mengarah pada Presiden SBY. Namun, ini tak berlanjut ke proses hukum setelah Amien bertemu Presiden SBY. Pertemuan yang dipandang sebagai pertemuan damai ini telah mengakhiri ketegangan di antara mereka dan menyelesaikan kasus itu secara politis (*Kompas*, 4 Juni 2007).

Di sisi lain, model penggunaan dana kampanye di Indonesia ternyata sangat kental dengan politik uang. Realitanya, bukannya para pendukung dan simpatisan capres yang menyumbang dana, tetapi justru capres dan tim kampanyenya yang memberikan uang kepada publik. Dengan kata lain, ini pembelian suara agar publik mendukung capres itu. Kondisi seperti inilah yang terjadi pada Pemilu 2004. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), semua capres pada Pemilu 2004 melakukan politik uang. Dari temuan lembaga ini, pasangan SBY-Jusuf Kalla (Partai Demokrat) terindikasi menebar politik uang paling banyak selama masa kampanye dengan nilai Rp 496 juta dalam 10 kasus. Namun, yang paling sering diduga melakukan politik uang adalah pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid (Partai Golkar). Pasangan ini memiliki catatan 17 kasus politik uang dengan nilai total Rp 87 juta (*Koran Tempo*, 30 Juni 2004).

Kasus itu membuktikan transaksi politik dalam pemilu di Indonesia cenderung mengarah pada bagi-bagi uang antara capres dan pemilih. Lemahnya aturan hukum yang mengikat pendanaan kampanye dalam Undang-Undang Pemilu merupakan sumber praktek kecurangan itu. Dalam pasal 131 UU No. 10/2008 tentang Pemilu, individu diperbolehkan menyumbang sebanyak-banyaknya Rp 1 miliar. Sedangkan, kelompok, perusahaan, dan badan usaha nonpemerintah bisa menyumbang maksimal Rp 5 miliar. Persoalannya, tidak ada aturan ketat yang mengatur mekanisme penyaluran dana itu beserta laporan penggunaannya. Itulah sebabnya, potensi pelanggaran kemungkinan besar terjadi. Celakanya, tidak ada sanksi tegas untuk menghukum pelanggaran itu.

Belajar dari AS, dana kampanye di Indonesia perlu diatur secara ketat. Pengaturan itu mulai dari transparansi penyumbang beserta nominalnya hingga audit penggunaan dana itu oleh akuntan independen. Belajar dari Obama, untuk mendapatkan dana kampanye berlimpah, seorang capres bisa mengandalkannya dari sumbangan masyarakat yang mendukungnya. Untuk itu, dibutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi dan menaruh banyak harapan menjanjikan agar banyak individu yang bersedia menyokong dana kampanye capres tanpa konsesi.

Semua itu harus dilaksanakan secara transparan. Publik harus memiliki akses mudah terhadap laporan dana kampanye. Obama membuktikan itu dengan tingkat akses atas laporan dana kampanyenya yang mencapai 90,7 persen dengan

jumlah nilai sumbangan yang dapat diakses sebesar 571,9 juta USD. Nilai ini lebih tinggi dari porsi keterbukaan McCain yang merepresentasikan 87,1 persen dengan total nilai sumbangan yang dapat diakses sebesar 160 juta USD (*Jawa Pos*, 21 November 2008).

Siap Menang dan Siap Kalah

Pemilu AS mempertontonkan sebuah pertunjukan demokrasi yang indah. Obama dan McCain adalah sosok capres yang siap menang dan siap kalah. Setelah dipastikan kalah, McCain menelepon Obama untuk mengucapkan selamat. Sejenak kemudian, ia berpidato di hadapan pendukungnya untuk mengakui kekalahannya dan mengajak pendukungnya untuk mendukung Obama sebagai presiden terpilih. Obama juga melakukan hal sama. Dalam pidato kemenangannya di Chicago, ia mengucapkan selamat kepada McCain atas pencapaian luar biasa yang diraihnya. Bahkan, ia juga memuji McCain sebagai pemimpin pemberani yang telah lama berkorban demi Amerika.

Delapan tahun sebelumnya, AS juga menampilkan tontonan demokrasi indah. Pada Pemilu 2000, terjadi pertarungan ketat dengan hasil selisih suara sangat tipis antara George W. Bush (Republik) dan Al Gore (Demokrat). Waktu itu, Bush meraih 271 *electoral votes* dari 30 negara bagian, sedangkan Gore memperoleh 266 *electoral votes* dari 20 negara bagian plus Washington DC. Namun, Bush memperoleh 50.456.002 *popular votes* (47,9 persen) dan Gore mendapat 50.999.897 *popular votes* (48,4 persen).

Dilihat dari *popular votes*, Gore lebih unggul. Namun, berdasarkan *electoral votes*, Bush lebih unggul dan terpilih sebagai presiden karena sistem pemilu AS mengatur pemenang berdasarkan perolehan *electoral votes*. Tetapi, terjadi perselisihan suara di Florida karena sebagian suara tak terbaca oleh mesin penghitung suara. Apabila suara yang tak terbaca itu adalah pemilih Gore, maka ada kemungkinan Gore memenangkan pemilu di Florida dan merebut 25 *electoral votes*. Karena itu, Gore meminta penghitungan ulang dengan menggunakan tangan. Tetapi, permintaan Gore itu ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) karena tidak adanya standar seragam untuk menentukan kehendak pemberi suara. Keputusan MA ini menjadikan Bush meraih suara terbanyak di Florida dan dinyatakan terpilih sebagai presiden ke-43 AS (Stephenson 2001, 20).

Gore sebagai pihak yang kalah dapat menerima keputusan itu meskipun dia merasa dirugikan dan lebih unggul dalam jumlah dukungan mayoritas pemilih. Gore mematuhi aturan sistem pemilu seperti tertuang dalam Konstitusi AS bahwa pada hakikatnya presiden AS tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi melalui sekelompok warga negara yang disebut "electoral college" (Janda et al.

1992: 320-321). Sangat mungkin seorang kandidat presiden memenangi *electoral votes* lebih banyak dan menjadi presiden walaupun kalah suara pemilih secara nasional. Itu terjadi tiga kali dalam sejarah AS, yaitu tahun 1876, 1888, dan 2000 (*Kompas*, 2 November 2008).

Keputusan Gore untuk tidak menggugat hasil pemilu merupakan sebuah keputusan yang menunjukkan tingginya kedewasaan berpolitik. Dukungannya kepada Bush sebagai presiden terpilih merupakan indikator betapa matangnya kedewasaan demokrasi di kalangan politisi AS yang pada akhirnya mampu menopang pilar-pilar demokrasi AS.

Rakyat Indonesia belum pernah sekalipun menyaksikan momen semacam itu dalam setiap kali pergantian presiden. Bahkan, ada kemungkinan apabila sistem di AS diterapkan di Indonesia, yang terjadi adalah kekisruhan. Penyebabnya, politisi Indonesia belum memiliki kedewasaan berpolitik dalam menyikapi kemenangan dan kekalahan dalam kompetisi politik untuk memperebutkan jabatan tertentu.

Contoh ketidakdewasaan berpolitik tampak pada pemilihan presiden 2004. Waktu itu, ketika SBY terpilih sebagai presiden mengalahkan capres *incumbent* Megawati, sama sekali tak ada adegan saling mengucapkan selamat di antara keduanya. Lebih tragis lagi, sejak saat itu, mereka tak pernah sekalipun bertemu atau hanya bertegur sapa. Sehingga, yang tampak di hadapan publik adalah ketidakakuran para pemimpin bangsanya. Tiga tahun sebelumnya, ketika Megawati menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dimakzulkan oleh MPR, hubungan baik keduanya mendadak rusak. Setelah pergantian kekuasaan, Megawati dan Gus Dur juga tak pernah bertegur sapa.

Kasus lain terjadi pada pemilihan bupati Tuban pada 27 April 2006. Pilkada yang diikuti oleh pasangan Haeny Relawaty-Lilik Soeharjono (Heli) dan Noor Nahar Hussein-Go Tjong Ping (Nonstop) itu berakhir rusuh. Kerusuhan itu dipicu oleh tipisnya perolehan suara kedua pasangan kandidat. Pasangan Heli memperoleh 327.784 suara (41,74 persen), unggul tipis dari pasangan Nonstop yang meraih 305.709 suara (48,26 persen). Puluhan ribu pendukung Nonstop yang tidak puas dengan hasil itu lantas melakukan demonstrasi besar-besaran yang berujung anarkis dengan pembakaran sejumlah fasilitas umum. Parahnya, aksi itu digerakkan oleh elite pendukung pasangan yang kalah (<http://forum-politisi.org/berita/article.php?id=87>, diakses 26 November 2008).

Berbagai peristiwa itu merupakan indikator belum matangnya kedewasaan berpolitik elite Indonesia. Kekalahan politik seringkali tidak bisa diterima oleh para pemimpin Indonesia. Pemilihan pada level apa pun di negeri ini sering diwarnai dengan benturan fisik. Lebih disayangkan lagi harta benda, termasuk kantor atau fasilitas umum yang sebenarnya milik pemerintah, dibangun dengan

uang dari pajak ikut dirusak sebagai pelampiasan kekecewaan. Celaknya, dalam banyak kasus, justru para kandidat tidak bisa menerima kekalahan justru membujuk massa untuk melawan (*Kompas*, 3 November 2008).

Jelas, ini bukanlah contoh bagus bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebab, demokrasi meniscayakan matangnya kedewasaan berpolitik dalam berperilaku. Salah satu kedewasaan itu adalah dengan berlapang dada menerima kekalahan dalam kompetisi politik. Kesiapan tak hanya ketika menang, tetapi juga ketika kalah. Sikap semacam itulah yang mampu meredam konflik yang mungkin saja muncul akibat kekecewaan salah satu pihak.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia jelas masih perlu beberapa tahapan untuk bisa sampai pada tahapan sebagaimana demokrasi di AS sekarang ini. Untuk mencapai kematangan seperti demokrasi AS, tidak ada salahnya para politisi Indonesia belajar dari sikap yang ditunjukkan para politisi AS. Politisi Indonesia harus banyak belajar menghadapi kekecewaan, belajar menerima kekalahan, dan belajar memberikan penghargaan kepada lawan politik. Ini penting dilakukan sebagai upaya meminimalisir konflik antarelite maupun antarmasyarakat di akar rumput serta untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat ditarik enam kesimpulan. Pertama, sistem politik dan pemerintahan demokratis mensyaratkan adanya pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil untuk menjamin rotasi kekuasaan secara berkala, teratur, dan damai. Untuk mencapai itu, setiap tahapan seleksi kepemimpinan harus melibatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sebagai bagian dari rakyat, setiap individu harus diperlakukan sama dan setara dalam pemberian kesempatan dan peluang untuk menduduki jabatan politik.

Kedua, sebagai negara maju yang telah melaksanakan demokrasi selama lebih dari 200 tahun, Pemilu AS 2008 menampilkan sejumlah pelajaran yang bisa dijadikan model dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Sebagai negara yang sedang dalam tahapan konsolidasi demokrasi, Indonesia bisa belajar pada AS yang telah mapan dalam berdemokrasi. Memang, kondisi di AS dan Indonesia berbeda. Dalam beberapa hal, bisa jadi ada ketidakcocokan sistem di antara kedua negara ini. Tetapi, tetap ada sejumlah kesesuaian yang bisa dipelajari seperti yang tertulis dalam empat kesimpulan selanjutnya.

Ketiga, semua tahapan seleksi kepemimpinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan melibatkan rakyat. Hal ini penting dilakukan mengingat seleksi kepemimpinan di Indonesia selama ini cenderung elitis. Akibatnya, hubungan rakyat dengan pemimpinnya terasa jauh. Langkah partai-partai di AS yang menjalankan konvensi dalam bentuk pemilihan pendahuluan dan kaukus yang melibatkan seluruh anggota partai bisa dijalankan partai-partai di Indonesia untuk menghasikan pemimpin yang mengakar kuat di masyarakat.

Keempat, terkait dengan seleksi kepemimpinan itu, setiap orang yang ingin menduduki jabatan politik di Indonesia harus diperlakukan sama dan setara. Dalam demokrasi, tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun, terutama kelompok minoritas. Karena itu, sudah tidak relevan lagi memperdebatkan isu presiden lelaki atau perempuan, Jawa atau luar Jawa, sipil atau militer. Tidak dibenarkan juga memberikan kesempatan istimewa pada orang-orang tertentu yang dekat dengan kekuasaan tetapi berkualitas rendah dan miskin pengalaman politik sehingga mematikan kesempatan orang lain yang telah bersusah payah merintis karir politik dari bawah agar bisa mencapai puncak kekuasaan.

Kelima, pengelolaan dana kampanye harus dilaksanakan secara profesional. Profesionalisme itu terwujud dari transparannya informasi tentang siapa saja penyumbang dana kampanye beserta penggunaan dana itu. Karena itu, dibutuhkan sebuah aturan yang mengatur secara ketat alur pendapatan dan pengeluaran dana kampanye. Selain itu, untuk mendapatkan limpahan dana kampanye, para kandidat dapat menggerakkan partisipasi rakyat untuk terlibat mendukung pencalonannya. Partisipasi ini akan efektif hanya jika kandidat dipercaya mampu menjanjikan perubahan ke arah yang lebih baik bagi rakyat.

Keenam, semua kandidat yang bertarung dalam kompetisi politik harus siap menang dan siap kalah. Pergantian kepemimpinan AS bisa berlangsung mulus karena kandidat yang kalah mengucapkan selamat dan mendukung kepemimpinan kandidat pemenang, sebaliknya kandidat pemenang memberikan penghargaan pada kandidat yang kalah. Di Indonesia, konflik sering terjadi karena para kandidat tidak memiliki sikap semacam ini. Konflik dipicu karena kandidat yang kalah merasa kecewa sehingga menggerakkan rakyat untuk memprotes hasil pemilihan. Untuk menghindari konflik yang merugikan rakyat, para politisi Indonesia harus banyak belajar bersikap dewasa dalam kompetisi politik. Kedewasaan berpolitik berarti menunjukkan kematangan demokrasi. Kematangan itulah yang nantinya mampu menopang pilar-pilar demokrasi Indonesia agar bisa berdiri tegak dan kokoh.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel dalam Buku

- Dahl, Robert, 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
- Gaffar, Afan, 2006. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel P., 1997. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Janda, Kenneth, Jeffrey M. Berry, dan Jerry Goldman, 2001. *The Challenge of Democracy: Government in America*, Third Edition. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Stephenson Jr, D. Grier, "Prinsip-Prinsip Pemilihan Demokratis" dalam Melvin I. Urofsky (ed.), *Demokrasi*, 2001. Office of International Information Programs US Department of State.
- Stone, John, dan Stephen Menkel, 2005. *Alexis de Tocqueville, tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Koran

- 135 Juta Warga AS Berikan Suara. *Kompas*, 5 November 2008.
- Belajar untuk Kecewa. *Kompas*, 3 November 2008.
- Besok, Sultan HB X Hadiri Forum PPP Mendengar. *Kompas*, 10 Desember 2008.
- Badoh, Ibrahim Zuhdhy Fahmy, 2008. Dana Kampanye Obama, *Jawa Pos*, 21 November.
- Capres Terbukti Tak Boleh Maju Lagi. *Jawa Pos*, 4 Juni 2007.
- Dana "Pesta" Rp 12,6 Triliun. *Kompas*, 1 November 2008.
- 'Electoral College', Demokrasi ala AS. *Kompas*, 2 November 2008.

Ini Dia Delapan Caores PKS. *Kompas*, 28 Oktober 2008.

Menanti Proses Hukum Dana Kampanye Ilegal. *Kompas*, 4 Juni 2007.

Mengapa pada Selasa, 4 November 2008?. *Kompas*, 31 Oktober 2008

Obama Unggul di Dunia Maya. *Kompas*, 1 November 2008.

PAN Siapkan Sembilan Nama Capres. *Jawa Pos*, 29 Desember 2008.

Semua Capres Dituding Lakukan Politik Uang; Sebagian Besar Berkedok Sumbangan Amal. *Koran Tempo*, 30 Juni 2004.

Terlibat Aktif. *Kompas*, 1 November 2008.

Yudhoyono Coret Anaknya dari Caleg Nomor Satu. *Kompas*, 22 Oktober 2008.

Situs Internet

Banking on Becoming President [online]. dalam <http://www.opensecrets.org/pres08/index.php?cycle=2008> [30 November 2008].

Berita Seputar Pilkada Tuban [online]. dalam <http://forum-politisi.org/berita/article.php?id=87> [diakses 26 November 2008].

<http://www.historycentral.com/elections/1789.html> [diakses 24 November 2008].

Jaring Capres, PPP Gelar Forum PPP Mendengar [online].

State Houses Elect Senators [online]. dalam http://www.senate.gov/artandhistory/history/minute/State_Houses_Elect_Senators.htm [diakses 24 November 2008].

The World Population and the Top Ten Countries with The Highest Population [online]. dalam <http://www.internetworldstats.com/stats8.htm> [diakses 24 November 2008].